

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 1991. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 02/PJ.43/1991 tentang Kewajiban SPT PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non efektif*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba
- Nenih Apriani. 2014. *Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai dalam Kepatuhan PT CI Sebagai Pemotong Pph Pasal 21*. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Depok.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi. 16/PJ/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.

Firliana Masrinofa. 2020. *Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang*. DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. Padang

Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Menteri Keuangan RI. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.klikpajak.d>

<https://www.pajakku.com/>

